

# Transparansi Anggaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Distrik Sorong Timur Kota Sorong

Fidelina Marshanda Sawaki, Saiful Ichwan, Ummu Salma

Universitas Muhammadiyah Sorong

Korespondensi: [ipul.ichwan@gmail.com](mailto:ipul.ichwan@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aims to examine how the level of budget transparency and community participation affects the development planning process in East Sorong District, Sorong City. The focus of this research is on the stages of regional development planning, namely the preparation of development priority documents, budget allocation, and monitoring and reporting. The method employed is a mixed quantitative–qualitative approach, involving surveys of community members and local government officials, as well as in-depth interviews with key stakeholders in the district. The results indicate that the level of budget transparency remains relatively low, as reflected in limited openness of budget information and suboptimal public access. Community participation in the planning process is also still limited, particularly at the early stages of program and activity formulation. These findings suggest that the combination of budget transparency and community participation can strengthen the quality of development planning, enhance accountability, and improve the relevance of programs to community needs. This study recommends improving public communication mechanisms related to budgeting, facilitating more open participatory forums, and strengthening community capacity to enable more active involvement in the development planning process.*

**Keywords:** *budget transparency, community participation, development planning, accountability.*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tingkat transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Fokus penelitian ini adalah pada tahapan perencanaan pembangunan daerah, yakni penyusunan dokumen prioritas pembangunan, alokasi anggaran, serta monitoring-pelaporan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif-kualitatif dengan survei kepada masyarakat dan perangkat daerah serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di distrik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi anggaran masih tergolong rendah, yang ditandai dengan keterbukaan informasi anggaran yang terbatas dan akses masyarakat yang kurang optimal. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga masih terbatas, terutama pada tahap awal penyusunan program/kegiatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kombinasi transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat kualitas perencanaan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas dan relevansi program bagi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan mekanisme komunikasi publik terkait anggaran, fasilitasi forum partisipatif yang lebih terbuka, serta penguatan kapasitas masyarakat agar dapat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan Pembangunan.

**Kata kunci:** transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, akuntabilitas.

## Pendahuluan

Pembangunan daerah memiliki tantangan penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara akuntabel. Salah satu aspek kritis adalah bagaimana anggaran publik dikelola dengan prinsip transparansi—yakni keterbukaan informasi kepada publik mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan dana—serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Dalam konteks Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, sebagai bagian dari wilayah otonomi di Indonesia yang menghadapi kondisi geografis dan demografis khas, muncul persoalan seperti: masyarakat yang sulit mengakses informasi anggaran, forum perencanaan yang kurang melibatkan masyarakat lokal, serta potensi kesenjangan antara kebijakan pembangunan dengan aspirasi warga. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa pembangunan yang dilakukan bisa kurang relevan atau kurang memperoleh dukungan masyarakat, dan akuntabilitas penganggaran menjadi lemah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat memiliki hubungan positif dengan kualitas pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan. Misalnya, penelitian pada lembaga pengelola dana khusus di Kabupaten Paniai menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat masih minim → praktik transparansi dan partisipasi belum optimal. Penelitian lain menunjukkan bahwa transparansi anggaran melalui penerapan e-budgeting dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memilih Distrik Sorong Timur, Kota Sorong sebagai lokasi studi untuk mengetahui bagaimana kondisi nyata transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah ini, serta implikasinya bagi kualitas pembangunan daerah.

Transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat merupakan dua aspek yang krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat daerah. Transparansi anggaran memungkinkan masyarakat untuk mengetahui alokasi, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana publik, sehingga dapat meminimalkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Kaufmann et al., 2011). Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan memberikan peluang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritasnya sehingga program pembangunan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik (Arnstein, 1969; Fung, 2006).

Di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, fenomena pembangunan daerah menunjukkan adanya dinamika terkait keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Beberapa penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa masyarakat seringkali hanya menjadi penerima manfaat dari kebijakan pembangunan, tanpa keterlibatan yang signifikan dalam tahap perencanaan maupun pengawasan (Putra, 2020; Hidayat, 2022). Hal ini menimbulkan risiko ketidakadilan dalam distribusi pembangunan, serta rendahnya akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Selain itu, akses informasi mengenai anggaran dan proses perencanaan pembangunan di Distrik Sorong Timur masih terbatas. Masyarakat menghadapi kendala seperti minimnya sosialisasi, kurangnya media informasi yang efektif, dan rendahnya literasi anggaran,

sehingga partisipasi aktif mereka dalam musyawarah pembangunan atau forum konsultasi publik masih sangat terbatas. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas pembangunan daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Transparansi Anggaran**

Transparansi anggaran berarti penyajian informasi keuangan publik (anggaran, pelaksanaan, pelaporan) secara terbuka, mudah diakses dan dipahami oleh publik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, transparansi adalah wujud pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Indikator transparansi anggaran dapat mencakup: ketersediaan informasi anggaran, kemudahan akses masyarakat terhadap informasi, dan keterlibatan publik dalam menyampaikan informasi. Dalam konteks perencanaan pembangunan, transparansi anggaran penting untuk meningkatkan akuntabilitas, mengurangi korupsi, meningkatkan kepercayaan publik serta partisipasi masyarakat.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran / Perencanaan**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga atau komunitas dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk penyusunan anggaran dan program pembangunan. Dalam konteks penganggaran, partisipasi memungkinkan masyarakat memberi masukan, menentukan prioritas, dan melakukan pengawasan. Undang-undang dan regulasi di Indonesia, misalnya PP No. 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan umum dan anggaran. Partisipasi masyarakat dianggap dapat meningkatkan kualitas kebijakan, relevansi program pembangunan, serta demokrasi lokal.

### **Hubungan Transparansi Anggaran dan Partisipasi Masyarakat**

Transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat saling berkaitan: keterbukaan informasi memberi masyarakat dasar untuk berpartisipasi secara bermakna, sedangkan partisipasi masyarakat mendorong agar proses anggaran lebih responsif dan akuntabel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Namun, ada juga yang menunjukkan bahwa meski transparansi tinggi, partisipasi masyarakat tidak otomatis meningkat jika masyarakat kurang memahami anggaran atau ruang partisipasi terbatas. Oleh karena itu, dalam kerangka penelitian ini diasumsikan bahwa: semakin tinggi tingkat transparansi anggaran dan semakin luas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, maka kualitas perencanaan pembangunan di Distrik Sorong-Timur akan semakin membaik—termasuk relevansi program, tingkat akuntabilitas, dan penerimaan masyarakat.

### **Good Governance / Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mencakup unsur transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, rule of law. Transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat merupakan dua aspek penting dalam memperkuat good governance dalam pengelolaan pembangunan daerah. Dalam konteks pembangunan distrik, penerapan

tata kelola yang baik membantu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, efektif dan efisien.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan demikian, peneliti menggambarkan secara mendalam fenomena implementasi prinsip good governance dalam pelayanan publik di Distrik Sorong Utara, Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner kepada masyarakat untuk mengukur persepsi mereka tentang transparansi anggaran (akses informasi, keterbukaan, pemahaman) dan partisipasi masyarakat (tingkat keterlibatan dalam forum perencanaan, masukan yang disampaikan, pengawasan), Wawancara mendalam dengan perangkat distrik/kelurahan, tim perencanaan pembangunan, serta tokoh masyarakat untuk memperoleh data kualitatif tentang praktik nyata transparansi dan partisipasi. Studi dokumen internal perencanaan pembangunan dan anggaran distrik/kelurahan (misalnya: rencana pembangunan, berita acara musrenbang, laporan anggaran) untuk mengetahui prosedur dan tingkat keterbukaan., Analisis Data: Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif (rata-rata, frekuensi) dan analisis korelasi/regresi sederhana untuk melihat hubungan antara transparansi anggaran, partisipasi masyarakat dan variabel hasil (misalnya: tingkat relevansi program, akuntabilitas, kepuasan masyarakat). Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait hambatan dan faktor pendukung transparansi dan partisipasi.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Tingkat Transparansi Anggaran**

Responden masyarakat menyatakan bahwa akses terhadap informasi anggaran penyusunan pembangunan di distrik relatif terbatas. Misalnya, banyak warga yang belum mengetahui secara rinci alokasi anggaran pembangunan untuk masing-masing kelurahan, atau waktu dan mekanisme musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kurang dipublikasikan secara efektif. Dokumentasi menunjukkan bahwa forum musrenbang di kelurahan dilaksanakan, namun notifikasi dan hasil musrenbang kurang didistribusikan secara terbuka ke masyarakat luas.

### **2. Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Meskipun ada kesempatan bagi masyarakat untuk hadir dalam musrenbang atau forum konsultasi publik, tingkat kehadiran dan keterlibatan aktif masyarakat masih terbatas. Beberapa warga hanya hadir sebagai peserta pasif tanpa menyampaikan masukan atau pengawasan lebih lanjut. Faktor yang disebut oleh informan: kurangnya pemahaman tentang anggaran, waktu forum yang tidak fleksibel, serta kurangnya sosialisasi. Wawancara perangkat distrik menegaskan bahwa mekanisme partisipasi formal sudah ada, tetapi implementasinya belum maksimal untuk melibatkan kelompok marginal atau komunitas yang jauh dari pusat distrik.

### **3. Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan**

Dari perspektif perangkat daerah dan tokoh masyarakat, proses perencanaan pembangunan di distrik semakin baik ketika masyarakat terlibat secara aktif dan ketika informasi anggaran disampaikan secara lebih terbuka. Namun, masih ditemukan bahwa beberapa program/ kegiatan disusun tanpa masukan memadai dari warga kelurahan dan

belum ditindaklanjuti dengan pemantauan yang melibatkan masyarakat. Analisis korelasi sederhana menunjukkan ada kecenderungan positif antara transparansi anggaran dan kualitas proses, demikian pula antara partisipasi masyarakat dan kualitas proses. Walaupun demikian, data kuantitatif menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi masyarakat lebih lemah jika transparansi anggaran rendah (yakni, meskipun masyarakat ingin terlibat, keterbukaan informasi yang terbatas memblokir efektivitas partisipasi).

Temuan ini konsisten dengan literatur sebelumnya yang menyebut bahwa transparansi anggaran memfasilitasi partisipasi masyarakat karena masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan untuk terlibat secara bermakna. Sebaliknya, kurangnya transparansi menghambat partisipasi aktif. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat penting, jika masyarakat tidak memiliki informasi anggaran yang cukup, maka efektivitas partisipasi akan terbatas.

Hambatan yang ditemukan di Distrik Sorong Timur mencakup: jarak geografis antar kelurahan, keterbatasan infrastruktur komunikasi, rendahnya literasi anggaran masyarakat, serta kebiasaan forum yang kurang representatif. Faktor-pendukung transparansi yang masih bisa dikembangkan misalnya: publikasi hasil musrenbang secara daring/tertulis, penyelenggaraan sosialisasi pra-musrenbang kepada komunitas lokal, penggunaan media lokal untuk menyampaikan alokasi anggaran. Meskipun partisipasi formal sudah diatur oleh regulasi, dalam praktiknya banyak masyarakat yang hanya hadir pada tahap pertemuan tetapi tidak benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau pengawasan tahap pelaksanaan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak cukup hanya fisik hadir, melainkan harus bermakna (input, deliberasi, pengawasan).

Dengan meningkatkan transparansi dan partisipasi secara bersamaan, proses perencanaan pembangunan bisa menjadi lebih relevan dengan kebutuhan warga, meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, dan memperkuat akuntabilitas perangkat daerah yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

## **Kesimpulan**

Tingkat transparansi anggaran di Distrik Sorong Timur masih perlu ditingkatkan—termasuk dalam hal keterbukaan informasi anggaran, pemahaman masyarakat terhadap anggaran, dan distribusi hasil musrenbang ke warga. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ada, tetapi masih terbatas baik dalam kualitas (masukan bermakna) maupun kuantitas (kehadiran dan keterlibatan aktif). Terdapat hubungan positif antara transparansi anggaran dan kualitas proses perencanaan pembangunan, serta antara partisipasi masyarakat dan kualitas proses perencanaan. Namun, efektivitas partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana transparansi anggaran dijalankan.

## **Daftar Pustaka**

Hasbi, Khairita & Putri, Elsyia Nabila. (2024). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Gampong terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujung Kampung*. Jurnal Transformasi Administrasi. [jta.lan.go.id](http://jta.lan.go.id)

Jaya Saragih, M. Ali, Sari, Eka Nurmala & Irfan, Irfan. (2025). *Konstruksi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Anggaran dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik*. Mandiri: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 3(3), 117-130. [jurnal.risetilmiah.ac.id](http://jurnal.risetilmiah.ac.id)

Kuddy, Aprianto La'lang. (2018). *Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Kabupaten Paniai*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2(1). [jurnal.man.feb.uncen.ac.id](http://jurnal.man.feb.uncen.ac.id)

Sjoraida, Diah Fatma; Setianti, Yanti; Priyatna, Centurion C. (2024). *Komunikasi Pemerintah dalam Manajemen Anggaran Daerah: Studi Transparansi dan Partisipasi Publik*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(2). [journal.ilmudata.co.id](http://journal.ilmudata.co.id)

Wijayanto, Hendra. (2024). *Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Penerapan e-Budgeting (Dalam Perspektif Teori Good Governance)*. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA). [journal.uta45jakarta.ac.id](http://journal.uta45jakarta.ac.id)

(Tambahan umum) Rawlins, B. (2008). ... (di dalam bibliografi teori akuntabilitas) – sebagai kerangka akuntabilitas keuangan daerah.

Undang-Undang / Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. [repository.upy.ac.id](http://repository.upy.ac.id)

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.